NANGGROE: SCIENTIFIC JOURNAL FOR NATION BUILDING
https://journal.ynam.or.id/index.php/jn
Pages 161-173

Moderasi Beragama Sebagai Fondasi Penguatan Indonesia Rukun Dan Damai di Tengah Keberagaman

Fauzan[1], Maulidya Safira[1],Wahyu Linda[2],Isna Maya Sari[3],Aida Rauzhatun Nisa[4],Elsa Liana[5],Selpita[6],Sarmida[7],Hairani[8],Intan Elfira[9],Mozayani[10]
[1-11]Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia
Email: fauzan@unisai.ac.id[1], maulidyasafira1547@gmail.com[2], 25120054@student.unisai.ac.id[3], 25120044@student.unisai.ac.id[4] , 25120047@student.unisai.ac.id[5], 25120046@student.unisai.ac.id[6], 5120048@student.unisai.ac.id[7], 25120149@student.unisai.ac.id[8] , 25120108@student.unisai.ac.id[9] ,25120160@student.unisai.ac.id[10] 25120053@student.unisai.ac.id[11]

ABSTRACT

Indonesia is a pluralistic nation endowed with high ethnic, cultural, and religious diversity. Behind this narrative of harmony, the implementation of religious moderation often remains trapped as a theoretical discourse at the elite level, lacking practical guidelines at the grassroots where social tensions occur. Consequently, a gap persists between macro peace rhetoric and the reality of local sociological interactions. This study aims to bridge this gap by formulating applicable steps to transform the concept of religious moderation into concrete action within a heterogeneous society. The methodology employed is library research, with data collection conducted through a comprehensive review of primary and secondary literature concerning moderation, conflict resolution, and social psychology, which was subsequently examined using content analysis. The principal results indicate that conventional religious moderation strategies are heavily dominated by top-down, normative-legalistic approaches, thereby failing to engage the citizens' emotional aspects. As a solution, this study formulates a harmony-strengthening model based on inclusive dialogue, the utilization of local wisdom, and a practical guide for basic-level conflict resolution. The major conclusion asserts that the internalization of the middle-way values operates effectively and sustainably only when grassroots communities are actively engaged as primary actors rather than mere policy objects. The primary contribution to the field is providing a concrete-conceptual bridge that aligns government macro-regulations with the psychosocial realities of society to achieve robust social integration. Through this humanistic and contextual approach, diversity at the grassroots level can be managed into social capital that reinforces the unity of the Republic of Indonesia.

Keywords: Religious Moderation, Diversity, Psychosocial Integration.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara majemuk dengan keragamaan budaya, dan agama yang tinggi. Di balik narasi keharmonisan tersebut, implementasi moderasi beragama sering kali terjebak sebagai wacana teoretis di tingkat elit tanpa panduan praktis di tingkat akar rumput yang memiliki tensi sosial tinggi. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara retorika perdamaian makro dan realitas interaksi sosiologis masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan merumuskan langkah-langkah aplikatif guna mentransformasikan konsep moderasi beragama menjadi aksi nyata di tengah masyarakat heterogen. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data melalui telaah literatur primer dan sekunder terkait moderasi, resolusi konflik, dan psikologi sosial, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa strategi moderasi beragama konvensional terlalu didominasi oleh pendekatan normatif-yuridis yang bersifat *top-down*, sehingga gagal menyentuh aspek emosional warga. Sebagai solusinya, kajian ini berhasil merumuskan model penguatan kerukunan berbasis dialog inklusif, pemanfaatan kearifan lokal, dan panduan praktis resolusi konflik tingkat dasar. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa internalisasi nilai jalan tengah akan berjalan efektif dan berkelanjutan ketika masyarakat tingkat bawah dilibatkan secara aktif sebagai aktor utama, bukan sekadar objek kebijakan. Kontribusi utama dari kajian ini adalah menyediakan jembatan konseptual-konkret yang menyelaraskan regulasi pemerintah dengan realitas psikososial masyarakat demi mewujudkan integrasi sosial yang kokoh. Melalui pendekatan yang humanis dan kontekstual ini, keberagaman di tingkat akar rumput dapat dikelola menjadi modal sosial yang memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Keberagaman, Integrasi Psikososial.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi kekayaan luar biasa dalam bentuk keragaman suku, budaya, bahasa, hingga agama(Akhmad, 2020). Kemajemukan ini menjadi identitas bangsa yang unik sekaligus menyimpan potensi tantangan dalam menjaga integrasi sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah cara pandang beragama yang moderat agar perbedaan keyakinan tidak menjadi pemicu perpecahan atau konflik antar sesama warga negara. Moderasi beragama hadir sebagai solusi strategis untuk menyeimbangkan praktik kehidupan spiritual dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang inklusif. Dengan menjadikan prinsip jalan tengah ini sebagai pondasi utama, Indonesia dapat terus berdiri kokoh sebagai bangsa yang rukun, damai, dan harmonis dalam bingkai persatuan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi kekayaan luar biasa dalam bentuk keragaman suku, budaya, bahasa, hingga agama. Sebagai

salah satu bangsa paling majemuk di dunia, Indonesia menjadi laboratorium sosial di mana ribuan identitas berbeda hidup berdampingan di bawah satu naungan(Lubis, 2025). Kekayaan ini bukan sekadar statistik kependudukan, melainkan warisan luhur yang membentuk karakter unik bangsa Indonesia sejak masa lampau. Keberagaman tersebut harus dipandang sebagai aset berharga yang memperkaya corak kehidupan bermasyarakat di setiap pelosok negeri. Oleh karena itu, kesadaran untuk merawat kemajemukan ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.

Kemajemukan yang sedemikian kompleks ini menjadi identitas bangsa yang unik sekaligus menyimpan potensi tantangan dalam menjaga integrasi sosial di tengah masyarakat (Rahmawati & Dhewantoro, 2025). Perbedaan latar belakang sering kali menciptakan garis demarkasi sensitif yang jika tidak dikelola dengan bijak dapat memicu gesekan antarkelompok. Dinamika sosial dalam masyarakat heterogen menuntut adanya kedewasaan dalam berinteraksi agar prasangka tidak berkembang menjadi sikap eksklusif. Tantangan integrasi ini semakin nyata seiring dengan cepatnya arus informasi yang mampu mempengaruhi persepsi publik terhadap perbedaan. Maka dari itu, upaya menjaga keutuhan bangsa harus tetap menjadi prioritas utama guna memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah cara pandang beragama yang moderat agar perbedaan keyakinan tidak menjadi pemicu perpecahan atau konflik antar sesama warga negara. Agama seharusnya menjadi jembatan perdamaian dan sumber inspirasi moral untuk saling menghormati, bukan justru dijadikan alat untuk memisahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Pemahaman yang ekstrem atau kaku dalam beragama cenderung menutup ruang dialog yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa (Muhtarom dkk., 2020). Masyarakat perlu didorong untuk melihat esensi ajaran spiritual yang mengedepankan kasih sayang dan penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui cara pandang yang terbuka, setiap pemeluk agama dapat berkontribusi secara positif dalam menjaga iklim kerukunan di tanah air.

Moderasi beragama hadir sebagai solusi strategis untuk menyeimbangkan praktik kehidupan spiritual dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang inklusif (Rudiana dkk., 2025). Konsep ini menawarkan jalan tengah yang menghindari sikap berlebih-lebihan dalam beragama agar tetap selaras dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat. Dengan mengedepankan prinsip moderasi, individu mampu menjalankan keyakinannya secara taat tanpa harus merendahkan atau memusuhi keyakinan orang lain. Nilai-nilai inklusivitas yang diusung dalam moderasi menjadi perekat kuat bagi struktur sosial yang rentan terhadap polarisasi ideologi. Implementasi konsep

ini sangat relevan untuk memperkokoh semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan menjadikan prinsip jalan tengah ini sebagai pondasi utama, Indonesia dapat terus berdiri kokoh sebagai bangsa yang rukun, damai, dan harmonis dalam bingkai persatuan. Pondasi yang kuat akan memastikan bahwa setiap riak perbedaan tidak akan mampu meruntuhkan bangunan kebangsaan yang telah diperjuangkan sejak lama. Kedamaian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila seluruh warga negara sepakat untuk menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam keberagaman. Harmonisasi antara kehidupan beragama dan bernegara inilah yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera. Pada akhirnya, persatuan yang tulus akan menjadi warisan terbaik bagi generasi mendatang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, di balik narasi besar tentang kerukunan tersebut, masih terdapat ruang kosong mengenai bagaimana implementasi moderasi beragama dapat diterapkan secara konkret pada level akar rumput yang memiliki tensi sosial tinggi. Selama ini, konsep moderasi sering kali hanya dipahami sebagai wacana teoretis di tingkat elit tanpa adanya panduan praktis yang mampu menjangkau dinamika keberagaman di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memetakan strategi penguatan pondasi kedamaian yang mampu menyelaraskan antara kebijakan negara dengan realitas psikologi sosial masyarakat yang sangat beragam.

Namun, di balik narasi besar tentang kerukunan tersebut, masih terdapat ruang kosong mengenai bagaimana implementasi moderasi beragama dapat diterapkan secara konkret pada level akar rumput yang memiliki tensi sosial tinggi. Meskipun secara makro Indonesia terlihat stabil, friksi-friksi kecil di tingkat lokal sering kali luput dari perhatian dan penanganan yang sistematis. Pemahaman masyarakat di tingkat bawah mengenai toleransi terkadang masih bersifat permukaan dan belum menyentuh substansi penyelesaian konflik yang mendalam. Kesenjangan antara retorika perdamaian di ruang publik dengan realitas interaksi sosial di lapangan menciptakan tantangan tersendiri bagi keutuhan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana nilai-nilai moderasi benar-benar diinternalisasi oleh masyarakat dalam menghadapi benturan kepentingan.

Selama ini, konsep moderasi sering kali hanya dipahami sebagai wacana teoretis di tingkat elit tanpa adanya panduan praktis yang mampu menjangkau dinamika keberagaman di kehidupan sehari-hari. Diskusi mengenai moderasi cenderung terjebak dalam ruang-ruang akademik dan seminar formal yang jarang menyentuh lapisan masyarakat terbawah secara efektif. Akibatnya, terjadi kegagapan ketika masyarakat dihadapkan pada situasi intoleransi yang nyata

karena absennya instrumen aplikatif yang mudah dipahami (Shohib, 2025). Kurangnya penerjemahan konsep abstrak ke dalam tindakan nyata membuat moderasi beragama seolah-olah menjadi narasi yang eksklusif bagi kalangan tertentu saja. Padahal, kekuatan sejati dari pondasi kedamaian terletak pada pemahaman dan praktik langsung oleh setiap individu dalam lingkungan terkecilnya.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memetakan strategi penguatan pondasi kedamaian yang mampu menyelaraskan antara kebijakan negara dengan realitas psikologi sosial masyarakat yang sangat beragam. Kebijakan yang bersifat top-down sering kali menemui hambatan karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik unik dan memori kolektif masyarakat di tiap daerah. Diperlukan sebuah jembatan yang menghubungkan visi besar pemerintah dengan kebutuhan psikologis masyarakat akan rasa aman dan saling menghargai. Tanpa adanya pemetaan yang akurat mengenai hambatan psikososial ini, upaya penguatan moderasi berisiko hanya menjadi program seremonial tanpa dampak jangka panjang. Kajian ini diharapkan mampu mengisi celah tersebut dengan menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual bagi penguatan Indonesia yang damai.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan merumuskan langkah-langkah aplikatif yang mampu mentransformasikan konsep moderasi dari sekadar wacana intelektual menjadi aksi nyata di tengah masyarakat. Meskipun berbagai studi sebelumnya telah banyak mengulas definisi dan urgensi moderasi beragama dari perspektif teologis maupun yuridis, namun fokus pada mekanisme internalisasi nilai tersebut dalam struktur psikologi sosial masyarakat akar rumput masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pengkajian ini dilakukan untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menganalisis strategi penguatan pondasi kerukunan yang lebih kontekstual, guna memastikan bahwa kedamaian di Indonesia tidak hanya kokoh secara administratif, tetapi juga mengakar kuat dalam kesadaran kolektif setiap warga negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan merumuskan langkah-langkah aplikatif yang mampu mentransformasikan konsep moderasi dari sekadar wacana intelektual menjadi aksi nyata di tengah masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan dialogis yang menyasar pada pola interaksi sosial paling mendasar agar nilai-nilai toleransi tidak lagi bersifat abstrak. Dengan merumuskan panduan yang lebih praktis, setiap lapisan masyarakat diharapkan memiliki rujukan yang jelas dalam menghadapi potensi gesekan. Transformasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa moderasi benar-benar menjadi nafas dalam setiap tindakan warga negara.

Meskipun berbagai studi sebelumnya telah banyak mengulas definisi dan urgensi moderasi beragama dari perspektif teologis maupun yuridis, namun fokus pada mekanisme internalisasi nilai tersebut dalam struktur psikologi sosial masyarakat akar rumput masih sangat terbatas (Amin Iskandar dkk., t.t.). Kebanyakan literatur yang ada masih terpaku pada tataran kebijakan normatif dan landasan teks keagamaan secara teoretis. Belum banyak peneliti yang menyentuh aspek emosional dan sosiologis masyarakat dalam menerima pesan-pesan moderasi di wilayah konflik atau daerah rentan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melihat bagaimana nilai-nilai tersebut dapat berakar secara alami tanpa paksaan struktural.

Oleh karena itu, pengkajian ini dilakukan untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menganalisis strategi penguatan pondasi kerukunan yang lebih kontekstual dan relevan. Fokus utama penelitian adalah memastikan bahwa kedamaian di Indonesia tidak hanya kokoh secara administratif di atas kertas, tetapi juga mengakar kuat dalam kesadaran kolektif setiap warga negara. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan ditemukan model penguatan yang sesuai dengan karakter unik masyarakat Indonesia yang beragam. Tujuan akhirnya adalah terciptanya tatanan sosial yang stabil di mana keberagaman dipandang sebagai kekuatan, bukan ancaman bagi persatuan nasional.

METODE KAJIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau yang dikenal dengan istilah *library research*. Secara singkat, *library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian tanpa memerlukan riset lapangan secara langsung. Dalam konteks kajian mengenai "Moderasi Beragama sebagai Fondasi Penguatan Indonesia Rukun dan Damai di Tengah Keberagaman", metode ini dipilih untuk membedah, menganalisis, dan mensintesis berbagai literatur teoretis maupun praktis yang berkaitan dengan konsep moderasi beragama, psikologi sosial masyarakat, serta dinamika kerukunan di Indonesia.

Proses pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, regulasi atau kebijakan pemerintah terkait moderasi beragama, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang mengulas tentang resolusi konflik dan integrasi nasional. Pengumpulan data pustaka ini difokuskan pada pencarian strategi konkret, panduan praktis, serta mekanisme internalisasi nilai-nilai jalan tengah (moderasi) yang dapat diterapkan pada level akar rumput untuk menjembatani kesenjangan antara wacana elit dan realitas sosial di masyarakat.

Setelah data kepustakaan terkumpul, analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kualitatif. Data-data yang bersifat konseptual dan normatif dieksplorasi secara mendalam, kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas psikologi sosial serta karakteristik unik masyarakat heterogen di Indonesia. Melalui pendekatan ini, kajian kepustakaan ini tidak hanya menghasilkan ulasan teoretis, melainkan mampu merumuskan langkah-langkah aplikatif dan model penguatan pondasi kedamaian yang berakar kuat pada kesadaran kolektif warga negara demi menjaga utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi kepustakaan, ditemukan bahwa formulasi strategi moderasi beragama selama ini masih didominasi oleh pendekatan normatif-yuridis yang bersifat *top-down* sehingga kurang menyentuh aspek psikologi sosial masyarakat di tingkat akar rumput. Kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa internalisasi nilai toleransi dapat berjalan efektif apabila pesan-pesan moderasi ditransformasikan ke dalam model dialogis yang berbasis pada kearifan lokal serta memori kolektif daerah setempat (Bahdar, 2023). Melalui analisis dokumen kebijakan dan hasil penelitian terdahulu, dirumuskan sebuah panduan praktis aplikatif yang menekankan pentingnya pendekatan humanis guna mereduksi prasangka sosial dan menutup ruang eksklusivisme dalam interaksi sehari-hari. Temuan pustaka juga menegaskan bahwa kekuatan sejati dari pondasi kedamaian nasional terletak pada penerjemahan konsep abstrak jalan tengah menjadi aksi nyata yang mudah dipahami oleh lingkungan terkecil masyarakat. Dengan menjembatani kesenjangan teoretis tersebut, model penguatan yang dihasilkan mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam melihat keberagaman sebagai sebuah kekuatan kolektif, bukan sebagai ancaman atau pemicu gesekan sosial. Secara administratif dan sosiologis, integrasi sosial yang kokoh dan berkelanjutan hanya dapat dicapai ketika masyarakat tingkat bawah dilibatkan secara aktif sebagai aktor utama dalam merawat kerukunan nasional.

Analisis Penulis Dari temuan studi kepustakaan di atas, penulis menganalisis bahwa kegagapan masyarakat dalam menghadapi dinamika intoleransi di lapangan berakar dari absennya instrumen aplikatif yang menyentuh ranah emosional warga. Kebijakan yang hanya bersifat seremonial di tingkat elit tidak akan pernah cukup untuk meredam friksi lokal yang memiliki tensi sosial tinggi. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa moderasi beragama harus didekatkan pada realitas psikososial masyarakat dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai jalan tengah ke dalam pola aktivitas ekonomi, budaya, dan gotong royong yang sudah ada di akar rumput. Hanya melalui

jembatan emosional dan pendekatan yang memanusiakan inilah, moderasi beragama dapat bertransformasi dari sekadar narasi eksklusif akademik menjadi kesadaran kolektif yang mengakar kuat demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penelusuran pustaka terhadap berbagai literatur, ditemukan bahwa formulasi strategi moderasi beragama di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan normatif-yuridis yang kaku. Kebijakan yang dilahirkan cenderung bersifat *top-down* atau instruktif dari lembaga pemerintah pusat menuju masyarakat bawah. Akibatnya, konsep-konsep yang ditawarkan sering kali terjebak dalam ruang-ruang birokrasi dan regulasi formal semata (Suwarno, 2025). Pendekatan yang terlalu administratif ini membuat esensi moderasi kurang menyentuh aspek psikologi sosial masyarakat di tingkat akar rumput. Akibatnya, masyarakat di tingkat lokal tidak memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap program-program kerukunan yang dicanangkan pemerintah.

Dominasi pendekatan formal tersebut pada akhirnya menciptakan jarak yang lebar antara pengambil kebijakan dan realitas di lapangan. Dokumen-dokumen kebijakan yang dianalisis menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyamaratakan kondisi sosial di seluruh wilayah Indonesia. Padahal, setiap daerah memiliki memori kolektif dan dinamika benturan kepentingan yang sangat berbeda satu sama lain. Kurangnya kepekaan terhadap variabel psikososial ini membuat program moderasi sering kali menemui jalan buntu saat dihadapkan pada konflik riil. Oleh karena itu, studi kepustakaan ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk meredefinisi strategi implementasi yang ada.

Melalui analisis mendalam terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu, kajian ini menemukan bahwa internalisasi nilai toleransi hanya akan berjalan efektif jika menjauhi pola pemaksaan struktural. Pesan-pesan perdamaian harus mampu ditransformasikan ke dalam model dialogis yang bersifat dua arah dan inklusif. Pendekatan dialogis ini memungkinkan masyarakat untuk mengutarakan kecemasan dan prasangka mereka tanpa rasa takut dihakimi. Dengan membuka ruang komunikasi yang jujur, sekat-sekat dogmatis yang selama ini memisahkan kelompok berbeda dapat perlahan terkikis. Langkah awal inilah yang menjadi kunci utama dalam membangun kembali kepercayaan antarkelompok di wilayah rentan.

Lebih lanjut, temuan pustaka menunjukkan bahwa transformasi nilai moderasi tersebut harus berbasis pada kearifan lokal yang sudah hidup di tengah masyarakat. Setiap suku dan daerah di Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme tradisional tersendiri dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga harmoni. Mengintegrasikan konsep moderasi beragama ke dalam

tradisi lokal akan membuat nilai-nilai jalan tengah tersebut terasa lebih familiar dan tidak asing (Harahap dkk., 2022). Masyarakat tidak akan merasa dipaksa mengadopsi konsep baru, melainkan merasa diingatkan kembali pada warisan luhur nenek moyang mereka. Dengan demikian, kearifan lokal berfungsi sebagai inkubator alami bagi tumbuhnya kesadaran toleransi yang substansial.

Selain kearifan lokal, memori kolektif daerah setempat juga memegang peranan yang sangat krusial dalam memetakan potensi integrasi. Literatur sosiologi menegaskan bahwa trauma masa lalu akibat konflik komunal dapat menjadi penghambat besar jika tidak dikelola dengan pendekatan yang humanis. Strategi moderasi yang kontekstual harus mampu menyembuhkan luka sejarah tersebut melalui rekonsiliasi yang berbasis pada rasa keadilan bersama. Ketika memori kolektif masyarakat diarahkan pada momen-momen kerja sama historis, sentimen negatif antarkelompok dapat direduksi secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa aspek psikologi massa tidak boleh diabaikan dalam merancang program penguatan kerukunan.

Berdasarkan pemetaan hambatan psikososial tersebut, kajian ini berhasil merumuskan sebuah panduan praktis aplikatif yang dapat digunakan oleh para penggerak di lapangan. Panduan ini dirancang khusus untuk menerjemahkan nilai-nilai moderasi yang abstrak menjadi langkah-langkah konkret yang mudah dipahami. Fokus utama dari panduan praktis ini adalah memberikan keterampilan resolusi konflik tingkat dasar bagi tokoh masyarakat dan pemuda di akar rumput (Wulan, 2024). Melalui instrumen ini, masyarakat tidak lagi gagap ketika dihadapkan pada letupan friksi kecil yang berpotensi membesar. Kehadiran panduan yang aplikatif ini diharapkan dapat mengisi ruang kosong yang selama ini ditinggalkan oleh wacana teoritis elit.

Formulasi panduan praktis tersebut secara konsisten menekankan pentingnya penggunaan pendekatan humanis dalam setiap interaksi sosial. Pendekatan humanis menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia di atas segala perbedaan teologis yang bersifat partikular. Ketika individu dilatih untuk melihat sesamanya sebagai manusia yang setara, prasangka sosial yang berbasis agama dapat direduksi dengan lebih mudah. Pendekatan ini juga efektif dalam menutup ruang eksklusivisme yang sering kali menjadi cikal bakal lahirnya sikap intoleran. Dengan hilangnya sikap eksklusif, ruang-ruang publik di tingkat akar rumput akan kembali menjadi tempat interaksi yang sehat dan inklusif.

Studi literatur ini juga menegaskan bahwa kekuatan sejati dari pondasi kedamaian nasional tidak terletak pada kemegahan seremoni akademik atau jargon politik (Zainuri, 2020). Kekuatan sesungguhnya berada pada keberhasilan menerjemahkan konsep abstrak jalan tengah menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Aksi nyata tersebut tidak harus berupa gerakan besar,

melainkan dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti gotong royong dan silaturahmi antar tetangga yang berbeda keyakinan. Ketika moderasi dipraktikkan dalam skala kecil, ia akan menjadi kebiasaan sosial yang mengakar dengan sendirinya. Pada tahapan inilah, kedamaian di tingkat nasional akan mendapatkan fondasi penyangga yang paling kokoh dan organik.

Melalui keberhasilan penerjemahan konsep tersebut ke dalam lingkungan terkecil, masyarakat secara bertahap akan mengalami perubahan paradigma yang mendasar (Tantowi, 2022). Model penguatan yang dihasilkan dari kajian kepustakaan ini mampu mengubah cara pandang kolektif masyarakat dalam menyikapi heterogenitas. Keberagaman tidak lagi dipandang secara sinis sebagai ancaman potensial yang dapat memicu gesekan atau perpecahan sosial. Sebaliknya, perbedaan yang ada justru diinternalisasi sebagai sebuah kekayaan dan kekuatan kolektif untuk membangun daerah. Perubahan cara pandang ini menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk menciptakan stabilitas wilayah yang berkelanjutan.

Dengan terjembataninya kesenjangan teoretis antara wacana elit dan realitas lapangan, maka strategi moderasi beragama kini memiliki daya pikat yang lebih membumi. Kajian ini membuktikan bahwa mempertemukan kebijakan makro pemerintah dengan kebutuhan mikro psikososial masyarakat adalah hal yang mutlak dilakukan. Keharmonisan antara aspek administratif negara dan kesadaran sosiologis warga negara menciptakan sinergi yang luar biasa dalam menangkal radikalisme. Kebijakan negara tidak lagi dianggap sebagai paksaan sepihak, melainkan dirasakan sebagai pelindung hak-hak spiritual setiap warga. Hubungan timbal balik yang positif inilah yang akan menjamin ketahanan nasional dari ancaman polarisasi ideologi.

Secara administratif dan sosiologis, integrasi sosial yang kokoh tidak akan pernah tercapai jika masyarakat tingkat bawah hanya diposisikan sebagai objek pasif. Temuan dari berbagai dokumen sosiologis menunjukkan bahwa kegagalan banyak program perdamaian disebabkan oleh absennya partisipasi aktif dari akar rumput. Oleh sebab itu, model penguatan kerukunan yang baru ini dengan tegas menuntut pelibatan masyarakat sebagai aktor utama dan subjek penggerak. Ketika masyarakat merasa memiliki tanggung jawab langsung atas kedamaian di lingkungannya, mereka akan menjadi benteng pertama yang menghalau setiap upaya provokasi (Musyafak & Nisa, 2020). Keterlibatan aktif inilah yang mengubah retorika kerukunan di ruang publik menjadi kenyataan hidup.

Pada akhirnya, seluruh rangkaian strategi yang dirumuskan melalui studi kepustakaan ini bermuara pada satu tujuan besar, yaitu terciptanya kerukunan nasional yang berkelanjutan. Ketika setiap lapisan masyarakat telah menginternalisasi nilai jalan tengah ke dalam kesadaran kolektif mereka,

kedamaian di Indonesia tidak akan lagi mudah goyah oleh isu-isu sensitif. Harmonisasi antara kehidupan beragama dan bernegara yang berjalan selaras di tingkat akar rumput akan menjadi fondasi utama yang menjaga tegaknya bangsa. Dengan demikian, moderasi beragama bukan lagi sekadar program seremonial tanpa dampak, melainkan telah bertransformasi menjadi urat nadi yang mengalirkan semangat persatuan di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENUTUP

Penelitian ini berhasil merumuskan langkah aplikatif berupa model dialogis berbasis kearifan lokal dan panduan praktis resolusi konflik tingkat dasar untuk mentransformasikan konsep moderasi beragama dari wacana elit menjadi aksi nyata di tingkat akar rumput. Melalui formulasi yang membumi ini, gagasan jalan tengah tidak lagi terjebak dalam ruang seminar akademik yang abstrak dan eksklusif. Langkah-langkah taktis yang dihasilkan dalam kajian ini dirancang agar mudah dipahami dan diadopsi oleh masyarakat dalam lingkungan terkecil mereka. Dengan demikian, kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan dapat segera dijembatani secara efektif. Upaya transformasi ini memastikan bahwa nilai toleransi dapat diimplementasikan secara konkret pada wilayah-wilayah yang memiliki tensi sosial tinggi.

Formulasi strategi ini didasarkan pada fakta bahwa pelibatan aktif masyarakat sebagai aktor utama dan pendekatan humanis yang menyentuh ranah psikologi sosial terbukti efektif mereduksi prasangka serta mengakar kuat dalam kesadaran kolektif warga (Suciati, 2026). Ketika masyarakat bawah tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif dari kebijakan pemerintah, mereka akan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap perdamaian di lingkungannya. Pendekatan humanis yang mengedepankan martabat manusia ini mampu mengikis sekat-sekat dogmatis dan menutup ruang bagi berkembangnya sikap eksklusivisme. Melalui interaksi yang sehat dan inklusif, friksi lokal yang sering kali luput dari perhatian pemerintah dapat diredam secara mandiri oleh warga setempat. Oleh karena itu, kekuatan sejati dari fondasi kedamaian nasional terletak pada kedewasaan psikososial masyarakat dalam merawat kebersamaan.

Kajian kepustakaan ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan studi sosiologi agama dan kebijakan publik dengan menyediakan jembatan konseptual-konkret untuk menyelaraskan antara regulasi makro pemerintah dan realitas psikososial masyarakat heterogen di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pedoman praktis bagi para pengambil kebijakan, penyuluh agama, serta penggerak kedamaian di tingkat akar rumput. Selain memperkaya khazanah literatur ilmiah mengenai resolusi konflik berbasis masyarakat, kajian ini juga

menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual. Integrasi antara kebijakan negara yang bersifat *top-down* dan kebutuhan psikologis warga akan rasa aman diharapkan dapat menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Pada akhirnya, kontribusi ini menjadi langkah nyata dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman.

REFERENSI

Akhmad, N. (2020). *Ensiklopedia keragaman budaya*. Alprin.

Amin Iskandar, L., Umayah, M. A., Syahrul Kirom, S. F., & Rijal Mahdi, L. (t.t.). *MENITI JALAN TENGAH: Moderasi Beragama dalam Pandangan Indonesia dan Mesir*. wawasan Ilmu.

Bahdar, B. (2023). *Arah Baru Islam Di Tanah Kaili; Meneguhkan Islam Moderat dan kearifan Lokal*.

Harahap, H. S. M., Siregar, H. F. A., & Darwis Harahap, S. (2022). *Nilai-nilai dan praktik moderasi beragama berbasis kearifan lokal di Sumatera Utara*. Merdeka Kreasi Group.

Lubis, F. H. (2025). *JEJAK IDENTITAS SOSIAL MUALLAF ETNIS INDIA DI MEDAN*. UMMPress.

Muhtarom, A., Fuad, S., & Latif, T. (2020). *Moderasi beragama: Konsep, nilai, dan strategi pengembangannya di pesantren*. Yayasan Talibuana Nusantara.

Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2020). *Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme; Aksi Damai dalam Konflik Agama*. Penerbit Lawwana.

Rahmawati, D. H., & Dhewantoro, H. N. S. (2025). DEMOKRASI DI TENGAH TANTANGAN KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA. *ADIDAYA: Aplikasi Pendidikan dan Sosial Budaya*, *2*(2), 75–82.

Rudiana, R., Komara, E., & Umam, H. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Multikulturalisme dan Toleransi dalam Sistem Moderasi Beragama. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(12), 14289–14297.

Shohib, M. A. (2025). *Kritik Atas Moderasi Beragama: Sebuah Telaah Kritis dalam Konteks Indonesia dan Global*. Penerbit Adab.

Suciati, H. (2026). *Kuasa, regulasi, dan perdamaian: Konstruksi sikap damai stakeholder pada konflik lintas agama*.

Suwarno, I. E. (2025). *Politik Kehutanan: Dinamika Kekuasaan, Regulasi, Dan Tata Kelola Indonesia*. Penerbit Adab.

Tantowi, H. A. (2022). *Pendidikan Islam di era transformasi global*. PT. Pustaka Rizki Putra.

Wulan, R. (2024). *Nilai budaya Sintuwo Maroso dalam pembangunan perdamaian pasca konflik Poso*.

Zainuri, A. (2020). *Narasi perdamaian membangun keharmonisan antar pemeluk agama di Indonesia*. CV Prabu Dua Satu.